

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tidak terlepas dari buku. Buku adalah salah satu pendukung keberhasilan dalam pendidikan. Keterbatasan daya ingat manusia, menyebabkan manusia menulis buku. Melalui buku berbagai ilmu disampaikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya untuk dipelajari, diamalkan, dan dikembangkan. Tanpa buku, sulit rasanya membayangkan seseorang dapat menjadi pintar, berilmu dan berpengetahuan. Di sekolah atau di beberapa instansi, buku-buku dikelola dengan cara khusus dalam suatu tempat yang dikenal dengan nama perpustakaan.

Sejak lama telah dikenal sebuah ungkapan "*perpustakaan adalah jantungnya ilmu pengetahuan*". Bila pendidikan diibaratkan dengan badan, maka perpustakaan adalah jantungnya. Bila perpustakaan sehat, maka sehat pulalah pendidikannya (Priyono, 2006:vii). Sebuah ungkapan yang ternyata telah terabaikan begitu saja. Adalah sangat ironis bila di dunia pendidikan sebagai sentra ilmu pengetahuan ternyata kurang atau bahkan tidak peduli sama sekali dengan keberadaan perpustakaan. Berbagai bidang pendidikan diperbaiki. Kurikulum direvisi, undang-undang pendidikan disodorkan, guru-guru ditatar, gedung-gedung sekolah baru didirikan, namun sayang keberadaan perpustakaan masih sering terabaikan. Sampai saat ini, masih ditemukan unit-unit sekolah yang pengelolaan perpustakaan sangat memprihatinkan atau bahkan ada yang tidak mempunyai perpustakaan.

Sebenarnya, perpustakaan bukanlah sebuah persoalan yang baru namun masih banyak orang yang salah mengasosiasikan perpustakaan dengan buku-buku, sehingga

setiap tumpukan buku di suatu tempat disebut perpustakaan (Bafadal, 2005:1). Memang perpustakaan memiliki salah satu ciri utama yaitu dengan adanya banyak buku namun bukan berarti setiap ada tempat penumpukan buku lalu dapat dikatakan sebagai perpustakaan. Perpustakaan memiliki arti lebih spesifik yakni sebuah ruang khusus dengan tatakerja yang khusus pula.

Banyak permasalahan yang dihadapi petugas perpustakaan dalam mengelola perpustakaan. Persoalan klise yang selalu ditemui dalam pengelolaan perpustakaan yakni dana pengelolaan dan perhatian yang kurang, terutama dari pemerintah. Hal inilah yang mengakibatkan beberapa perpustakaan hidup segan mati tak mau. Bahkan ada yang terancam gulung tikar karena sulit mencari sumber dana pemeliharaan (Gerbang, Edisi 3 Thn. IV, 2004). Hal seperti itu juga dapat dilihat pada fenomena sebagai berikut:

"1. Rendahnya persentase anggaran yang dialokasikan untuk perpustakaan, 2. Rendahnya perencanaan program pengembangan perpustakaan, implementasi dan evaluasi, 3. Kurangnya upaya pemerintah mencari upaya pendanaan perpustakaan, 4. Lemahnya upaya pengintegrasian pelayanan perpustakaan dengan kurikulum sekolah." (Siregar, 2004:10,11).

Fuad Gani mengatakan, pada hasil penelitian pada Desember 2003, terungkap bahwa 20% siswa menyatakan bahwa sekolahnya tidak mempunyai perpustakaan. Kepala Sekolah cenderung lebih tergiur membangun fasilitas sekolah seperti gedung bertingkat, lapangan, pendingin ruangan, komputer tetapi perpustakaan-terutama koleksinya-sering luput (Kompas, 28 April 2005, Hlm. 9). Penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yakni pada tahun 1993 atas 70 buah sekolah TK, SD dan SMP di Jakarta, memperlihatkan bahwa hanya 36% perpustakaan yang didirikan bersamaan dengan pembangunan gedung sekolah, sedangkan 64% baru dipikirkan setelah pembangunan sekolah rampung (Tain, tanpa tahun:25).

Ternyata perpustakaan masih sering terabaikan. Banyak kalangan di dunia pendidikan yang seharusnya bertanggung jawab dengan keberadaan perpustakaan tetapi malah melupakan tanggung jawab tersebut. Misalnya, pada penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), alokasi dana untuk perpustakaan sekolah sering terabaikan. Kalaupun ada hanya sebatas honor untuk petugas pustaka, sedangkan alokasi dana untuk penambahan koleksi, pemeliharaan koleksi, dan pemeliharaan sarana pustaka lainnya belum mendapat perhatian.

Di sekolah-sekolah negeri pada umumnya, tugas di perpustakaan dianggap sebagai tugas tambahan bagi seorang guru yang kurang jam mengajar sehingga tidak perlu diberi insentif khusus untuk tugas tambahannya itu. Lebih memprihatinkan lagi, bila tugas sebagai pustakawan dianggap sebagai tugas buangan bagi guru atau pegawai yang ada. Guru atau pegawai yang ditugaskan di perpustakaan dianggap adalah mereka yang bermasalah, malas kerja, dan tidak akan berkembang karirnya. Akibatnya, perpustakaan yang dikelola akhirnya hanya menjadi gudang buku, gudang peralatan olah raga atau peralatan lainnya, jarang dibuka, apalagi melayani para penggunanya. Padahal bila dikelola dengan baik, perpustakaan di sekolah, sangat membantu proses belajar-mengajar karena perpustakaan dapat dijadikan pusat kegiatan belajar mengajar, pusat penelitian sederhana, pusat membaca, bahkan dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi siswa (Harlinaty, 2003:2). Beberapa penelitian telah membuktikan peran penting perpustakaan dalam dunia pendidikan, seperti peran perpustakaan terhadap minat baca (Harmain, 2005), dan peran perpustakaan terhadap prestasi belajar (Ritonga, 2005).

Pada Kepmen PAN No. 18 Tahun 1988, pemerintah sendiri telah memberikan perhatiannya terhadap keberadaan perpustakaan di sekolah-sekolah. Khusus untuk tenaga pengelola perpustakaan berstatus Pegawai Negeri Sipil digolongkan kepada tenaga

fungsional yang mendapat tunjangan khusus (Sutarno, 2003:8). Susilo Bambang Yudoyono telah meminta agar masyarakat lebih peduli terhadap pencerdasan bangsa dengan membangun perpustakaan yang dapat dijangkau semua golongan. Perpustakaan itu sendiri diharapkan harus mampu membangkitkan minat baca masyarakat (SIB, 18 Mei 2006, Hlm. 14). Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah dicantumkan bahwa "Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan, yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala" (Pasal 35:1). Selanjutnya pasal ini diperjelas dengan pasal 42 ayat 2 yang berbunyi:

"Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tatausaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain tempat berkreasi, dan ruang tempat lain yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan."

Ternyata pemerintah cukup tegas dengan keberadaan perpustakaan di sekolah. Perpustakaan bukan berarti boleh ada boleh tidak bagi sebuah sekolah, tetapi *wajib ada*.

Bagaimana dengan koleksi perpustakaan sekolah? Realitanya, bila keberadaan perpustakaan di sekolah saja belum mendapat perhatian dari pihak sekolah, apalagi untuk koleksi perpustakaan tentu tidak dapat diharap banyak. Padahal untuk koleksi perpustakaan, layaknya jumlah buku bacaan yang dikoleksi sebanding dengan jumlah siswa yang ada seperti telah dinyatakan dalam Standar Nasional Pendidikan bahwa "*standar buku perpustakaan* dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan di satuan pendidikan" (Pasal 43:3, PP RI No. 19 Thn. 2005)

Rasio ideal jumlah buku di perpustakaan sekolah digambarkan oleh Fuad Gani dengan memberikan perbandingan minimal. Menurutnya, koleksi buku perpustakaan SD di Indonesia rasionya satu anak berbanding dengan 5 buku saja sudah cukup baik. Bila ditinjau dari isinya, idealnya perpustakaan di sekolah berisi buku pendamping pelajaran dan yang dibutuhkan anak untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Namun demikian, sekolah tidak perlu ragu untuk menarik minat baca anak dengan menyediakan buku fiksi, komik, dan cerita rakyat yang bernilai positif (Kompas, 28 April 2005, Hlm. 9). Sedangkan untuk Sekolah Tingkat Pertama, sebaiknya satu siswa berbanding 12 judul buku. Bila siswa berjumlah 700 orang, berarti idealnya minimal memiliki 8.400 judul buku bacaan. Inilah yang sering tidak terpenuhi (Sitepu, 2003:6).

Pada saat sekarang ini, dengan adanya dana BOS untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pemerintah telah berusaha meringankan beban biaya pendidikan bagi anak didik. Mulai biaya iuran sekolah hingga pembelian buku-buku pelajaran. Seharusnya, di sinilah peran perpustakaan semakin terlihat. Buku-buku pelajaran sekolah yang dipakai belajar siswa dikelola di perpustakaan di samping buku-buku bacaan lainnya.

Rasa kagum pantas ditujukan kepada Yessy Gusman yang telah mendirikan Taman Bacaan Anak secara pribadi dengan modal awal 40 buah buku, kini memiliki 800.000 buku fiksi dan nonfiksi (Gerbang Edisi 2 Thn, V 2005:29). Pantas diberi acungan jempol juga untuk masyarakat Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak yang berhasil membangun sebuah perpustakaan terletak di SD Negeri 101791. Mereka membangun perpustakaan tersebut melalui dana swadaya. Perpustakaan ini memiliki 432 buku dan literatur sebagai koleksi perdana untuk kepentingan masyarakat umum, khususnya pelajar. (Waspada, 23 Agustus 2006, Hlm. 17). Tentu sangat diharapkan, perpustakaan ini tidak hanya sebatas didirikan tetapi akan ditindaklanjuti dengan pengelolaan yang baik sehingga dapat berfungsi seperti

diharapkan oleh semua pihak, apalagi perpustakaan ini berada di kompleks Sekolah Dasar dan dikhususkan untuk para pelajar. Di kalangan SMP, patut berbangga hati terhadap prestasi Perpustakaan SMP Negeri 1 Madina yang berhasil memperoleh peringkat IX Terbaik Nasional pada Hari Ulang Tahun ke-61 Republik Indonesia (Waspada, 25 Agustus 2006, Hlm. 19). Memang masih bisa dibanggakan karena dalam keterbatasan perpustakaan secara umum, ternyata masih ada segelintir orang-orang yang peduli dengan keberadaan perpustakaan.

Rendahnya minat baca juga menjadi kendala bagi pengelolaan perpustakaan. Masyarakat Indonesia lebih dikenal sebagai masyarakat lisan daripada tulisan, sehingga akan dijumpai orang-orang yang suka *ngobrol* daripada membaca. Masyarakat lebih menyukai *gossip* dari pada fakta (Gerbang, Edisi 3 Tln. IV, 2004 Hlm.11).

Dalam pengelolaannya, sebuah perpustakaan membutuhkan tenaga pengelola yang professional agar dapat berfungsi secara optimal. Dikatakan demikian, karena pengelolaan perpustakaan bukanlah pekerjaan yang ringan. Pengelolaan perpustakaan memerlukan orang yang memahami perpustakaan, cara kerja, manajemennya, dan yang paling utama haruslah orang-orang yang mencintai buku. Seperti dinyatakan oleh Putri, bahwa "pustakawan bukanlah profesi yang sembarangan, pustakawan sama pentingnya dengan profesi dokter dan guru yang memiliki peranan dan jasa mulia. Sayangnya, masyarakat kita tidak akrab dengan perpustakaan bahkan ada yang tidak mengenal perpustakaan apalagi kenal dengan profesi pustakawan" (Waspada, 24 Juli 2006, Hlm. 3).

Hasil penelitian di Jakarta pada tahun 1993, juga memperlihatkan bahwa untuk tingkat profesionalisme pustakawannya, 76% para pengelolanya merangkap sebagai guru, 24% lainnya adalah pegawai koperasi, atau tatusaha. Tidak ditemukan pengelola perpustakaan tamatan Jurusan Perpustakaan (Tain, tanpa Tahun:25). Kalau demikianlah

adanya pengelola perpustakaan, tentu sulit untuk mewujudkan pengelolaan perpustakaan yang optimal.

Di Sumatera Utara khususnya, telah ada pendidikan Jurusan Perpustakaan di USU, namun sayang alumni mereka kurang diberdayakan ke sekolah-sekolah setingkat SMP, SMA apalagi SD, oleh yang berwenang terutama pemerintah. Dari alumni pertama, (Angkatan tahun 1985 hingga tamatan 2005) hanya 1 (satu) orang yang ditugaskan pemerintah di Sekolah Menengah Pertama yakni SMP Negeri Medan Labuhan, di SD dan SMA tidak ada. Di sekolah swasta malah lebih banyak di pakai, yakni di SMA Persit, SD Sutomo, SMA Sotomo, SMK Setia Budi, SMA Jambi, SMA Al Azhar, dan Y.P. Siti Hajar, serta di beberapa perguruan tinggi swasta lainnya. Beberapa dari mereka lainnya bekerja sebagai pustakawan di perpustakaan wilayah atau perpustakaan daerah. (Departemen Studi Perpustakaan dan Informasi USU, 2006). Sebenarnya, bila pemerintah benar-benar komitmen dengan ketetapannya terhadap perpustakaan sekolah, seharusnya memberdayakan para alumni jurusan perpustakaan ini dengan mempekerjakan mereka di perpustakaan-perpustakaan sekolah, khususnya sekolah negeri. Bukannya membiarkan perpustakaan sekolah terlantar karena ketiadaan teraga pengelola yang profesional. Berapa pun banyak disumbangkan ke sebuah perpustakaan, bila tidak dikelola dengan baik maka akan sia-sia saja keberadaan buku tersebut. Keadaan seperti ini sangat memperhatikan bagi dunia pendidikan kita.

Selain pengetahuan tentang perpustakaan, seorang pengelola perpustakaan sebaiknya juga mampu memanaajemen perpustakaan itu dengan baik. Manajemen tersebut meliputi penyusunan program kerja dan program pengembangan, melaksanakan program seperti penataan sarana dan peralatan, pengadaan koleksi, pengolahan, sirkulasi, pelayanan, dan

pengawasan, serta melaksanakan pengawasan. Tidak hanya duduk diam saja, atau malah jarang membuka perpustakaan.

Di Kabupaten Deli Serdang, ada 40 SMP Negeri. Tiga di antaranya berstatus Sekolah Standar Nasional (SSN), yakni SMP Negeri 1 Lubuk Pakam, SMP Negeri 1 Labuhan Deli, dan SMP Negeri 1 Hampanan Perak (Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deli Serdang). Namun perpustakaan di seluruh SMP itu, termasuk di ketiga SMP SSN tersebut, tidak satu pun dikelola oleh seorang petugas yang memiliki latar belakang pendidikan jurusan perpustakaan atau mendapat diklat yang cukup tentang perpustakaan (Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deli serdang). Latar belakang pendidikan yang ada hanyalah sebatas diklat terbatas. Seperti seorang petugas perpustakaan SMP Negeri Hampanan Perak yang telah mendapat diklat Teknis Perpustakaan. Pada observasi awal penulis ke beberapa sekolah, keberadaan perpustakaan masih belum memenuhi seperti yang diharapkan. Banyak perpustakaan yang hanya menjadi gudang buku paket dengan sedikit buku bacaan tambahan tanpa pengelolaan yang baik dan benar. Perpustakaan terlihat sebagai satu ruang yang *sumpek* dengan timbunan buku-buku paket usang dan beberapa buku baru yang tidak teratur.

Demikian pula ketika penulis berkunjung ke salah satu SMP yang berstatus Sekolah Standar Nasional (SSN), ternyata keberadaan dan pengelolaan perpustakaan juga belum seperti yang diharapkan. Perpustakaan di SMP Negeri 1 Lubuk Pakam misalnya, dikelola oleh seorang tenaga perpustakaan sebagai penanggung jawab dibantu oleh delapan orang petugas lainnya. Namun, tidak satu pun dari petugas perpustakaan tersebut termasuk kepala (penanggung jawab) perpustakaan yang mendapat pendidikan atau pelatihan tentang perpustakaan sehingga pengetahuan mereka tentang perpustakaan sangat minim. Semua petugas perpustakaan tersebut termasuk kepala

perpustakaan, merangkap sebagai guru mata pelajaran. Perpustakaan hanya dipenuhi dengan buku paket atau buku pelajaran sedangkan buku bacaan (nonbuku pelajaran) sangat minim, dan kebanyakan sudah usang. Tidak sebanding dengan jumlah siswa yang lebih dari seribu orang (24 kelas dengan 1024 orang). Padahal dengan menyandang gelar SSN, diharapkan sekolah tersebut memiliki berbagai sarana dan prasarana, termasuk perpustakaan yang dapat dijadikan standar acuan bagi SMP lainnya, baik negeri maupun swasta. Seperti telah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan pengamatan awal penulis serta beberapa data seperti dikemukakan di atas, fenomena yang tergambar mengenai perpustakaan sekolah pada umumnya secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan belum dianggap penting sebagai sarana penunjang pendidikan. Kondisi fisik, peralatan dan perlengkapannya belum mendapat perhatian.
2. Koleksi perpustakaan sekolah masih tergolong kurang, baik dari jenis maupun jumlahnya.
3. Petugas perpustakaan sekolah pada umumnya tidak berlatar belakang pendidikan perpustakaan atau mendapat pendidikan dan pelatihan perpustakaan yang cukup.
4. Pengelolaan perpustakaan sekolah belum optimal.

Berbagai fenomena perpustakaan seperti telah dikemukakan di atas itulah yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yakni bagaimana manajemennya? Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengelola perpustakaan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang masalah yang berhubungan dengan perpustakaan, khususnya tentang Pola Manajemen Perpustakaan

di Sekolah Menengah Pertama. Diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini, hasilnya dapat menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan seputar masalah perpustakaan sekolah seperti dikemukakan di atas.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang terlihat bahwa penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu pekerjaan yang sangat kompleks, meliputi penyusunan program kerja dan program pengembangan, pengadaan dan sirkulasi koleksi, penataan sarana dan peralatan, dan pelayanan sehingga membutuhkan pengelolaan yang profesional. Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan terdahulu, penelitian ini difokuskan pada "Pola Manajemen Perpustakaan pada SMP Negeri Berstandar Nasional di Kabupaten Deli Serdang". Adapun SMP Negeri yang memiliki status standar nasional di kabupaten Deli Serdang yakni SMP Negeri 1 Lubuk Pakam, SMP Negeri 1 Labuhan Deli, dan SMP Negeri 1 Hampanan Perak (Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deli Serdang, 2006).

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen Perpustakaan pada SMP Negeri Berstandar Nasional di Kabupaten Deli Serdang? Untuk lebih terarahnya permasalahan tersebut, maka penulis spesifikasikan pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana perencanaan perpustakaan pada SMP Negeri Berstandar Nasional di Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana pengorganisasian perpustakaan pada SMP Negeri Berstandar Nasional di Kabupaten Deli Serdang?

3. Bagaimana pelaksanaan program (kinerja) perpustakaan pada SMP Negeri Berstandar Nasional di Kabupaten Deli Serdang?
4. Bagaimana pengawasan perpustakaan pada SMP Negeri Berstandar Nasional di Kabupaten Deli Serdang?
5. Apa saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan perpustakaan pada SMP Negeri Berstandar Nasional di Kabupaten Deli Serdang?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola manajemen perpustakaan pada SMP Negeri Berstandar Nasional di Kabupaten Deli Serdang. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perencanaan perpustakaan pada SMP Negeri Berstandar Nasional di Kabupaten Deli Serdang
2. Mengetahui pengorganisasian perpustakaan pada SMP Negeri Berstandar Nasional di Kabupaten Deli Serdang .
3. Mengetahui pelaksanaan program (kinerja) perpustakaan pada SMP Negeri Berstandar Nasional di Kabupaten Deli Serdang.
4. Mengetahui pengawasan perpustakaan pada SMP Negeri Berstandar Nasional di Kabupaten Deli Serdang .
5. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan perpustakaan pada SMP Negeri Berstandar Nasional di Kabupaten Deli Serdang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk pengembangan ilmu yang berkaitan dengan masalah manajemen perpustakaan sekolah khususnya, dan pada umumnya dalam bidang Administrasi Pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Bahan masukan bagi SMP Negeri Berstandar Nasional di Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan perpustakaan sekolah.
- b. Bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang sebagai pihak yang berwenang untuk penugasan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pustakawan.
- c. Bahan masukan bagi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai penyedia tenaga pendidik dan pelatih perpustakaan.
- d. Bahan masukan semua pihak yang berwenang menunjuk dan menugaskan seseorang sebagai pustakawan.

F. Batasan Istilah

1. Pola Manajemen Perpustakaan adalah suatu model, suatu sistem, atau suatu cara kerja dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) di dalam proses pengelolaan perpustakaan.

2. Perencanaan dalam perpustakaan adalah aktivitas pengambilan keputusan tentang sasaran yang akan dicapai, tindakan apa yang akan diambil dalam rangka pengelolaan perpustakaan.
3. Perpustakaan sekolah adalah suatu unit kerja di persekolahan, tempat menyimpan koleksi, dengan tatakerja khusus dan sistematis, digunakan berkesinambungan, dan sebagai sumber informasi bagi siswa, guru dan warga sekolah lainnya.
4. Pengorganisasian adalah kegiatan mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab masing-masing yang bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang sesuai dan tepat. Struktur organisasi dalam perpustakaan, secara umum terdiri dari Ketua, dibantu unit lain yakni unit administrasi, unit pengadaan, unit pengolahan, unit pelayanan (sirkulasi), dan unit referensi.
5. Pelaksanaan dalam perpustakaan yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan kerja (*actuating*) dalam perpustakaan. Pelaksanaan kerja dari setiap unit organisasi (pimpinan hingga staf-stafnya). Dimulai dari perencanaan, pengadaan, inventarisasi, klasifikasi (katalogisasi, label buku, kartu buku, slip tanggal, dan kantong buku), penyusunan, pelayanan, pembinaan, sampai kepada evaluasi.
6. Pengawasan adalah tindakan yang dilaksanakan untuk mengawasi terlaksana atau tidaknya tugas-tugas yang telah diprogramkan.
7. Kendala adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Kendala bisa muncul dari luar diri (eksternal) dan bisa pula dari dalam diri (internal).